DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan Perundang- undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek).

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Herziene Inlandsch Reglement (HIR)

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

B. Buku

Agustina Rosa. (2003). Perbuatan Melawan Hukum. Cet. Ke-1. *Jakarta: Program Pascasarjana FH UII.*

Badrulzaman, Mariam Darus. (2015). KUH Perdata Buku III: Hukum Perikatan dengan Penjelasan. *Bandung: Alumni.*

Badan Pertanahan Nasional. (1989). Himpunan Karya Tulis Pendaftaran Tanah. *Jakarta: Badan Pertanahan Nasional*.

Effendi, Bachtiar (1993), Kumpulan Tulisan Tentang Hukum Tanah. *Bandung: Alumni*.

Fuady Munir. (2005) Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer. Cet. Ke-2. *Bandung: Citra Aditya Bakti*.

Harahap, M. Yahya. (2005). Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan. Cet. ke-1. *Jakarta: Sinar Grafika*.

Harsono, Boedi. (2013). Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaanya. *Jakarta: Djembatan.*

Ibrahim, Jhonny. (2006).Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. *Malang: Bayumedia Publishing*

Marzuki, Peter Mahmud. (2008). Penelitian hukum. *Jakarta: Kencana*.

Mertokusumo Sudikno. (2013). Hukum Acara Perdata Indonesia. *Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka*.

Muhammad, Abdulkadir. (2003). Hukum Perikatan. *Bandung: Citra Aditya Bakti.*

Muhammad Abdulkadir. (2010). Hukum Perdata Indonesia, *Bandung: Citra Aditya Bakti*.

Muljadi Kartini dan Gunawan Widjaja. (2004). Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian. *Jakarta: Raja Grafindo*.

Parlindungan, A.P. (1999). Pendaftaran Tanah di Indonesia. Cet. Ke-2. *Bandung: Mandar Maju.*

Perangin Effendi. (1986). Hukum Agraria Di Indonesia Suatu Telaah Dari Sudut Pandang Praktisi Hukum. *Jakarta: CV. Rajawali*.

Prodjodikoro, Wirjono. (1985). Asas-Asas Hukum Perjanjian. *Bandung: Sumur Bandung.*

Santoso Urip. (2009). Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah, *Jakarta: Kencana Prenada Media Group.*

Satrio, J. (1992). Hukum Perjanjian: Perjanjian Jual Beli. *Bandung: Citra Aditya Bakti.*

Setiawan, R. (1987). Pokok-Pokok Hukum Perikatan. *Bandung: Binacipta.*

Soekanto, S., & Mamudji, S. (2006). Penelitian Hukum Normatif Tinjauan Singkat. *Jakarta: Rajawali Pers*.

Subekti, R. (1995). Aneka Perjanjian. Cet. ke-10. *Bandung: Citra Aditya Bakti.*

Subekti R. (2005) Hukum Perjanjian. Cet. ke-21. *Jakarta: Intermasa.*

Subekti, R. dan R. Tjitrosudibio. (2014). Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Cet. Ke-40. *Jakarta: Pradnya Paramita*.

Sumardjono, Maria S.W. (2009). Kebijakan Pertanahan: Antara Regulasi dan Implementasi. Cetakan Revisi. J*akarta: Kompas.*

Sutantio, Retnowulan dan Iskandar Oeripkartawinata. (2009). Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek. *Bandung: Mandar Maju*.

Sutedi Ardian, (2006). Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya. *Jakarta: Sinar Grafika*.

Tim Buku Pedoman Penulisan Tugas Akhir Program Studi Hukum Program Sarjana. (2020). *Yogyakarta*.

C. Jurnal :

Diantha, I Made Pasek. (2018). "Kekuatan Pembuktian Penguasaan Fisik Bidang Tanah dalam Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap". *Jurnal Magister Hukum Udayana*. Vol. 7, No. 3.

Fatmawati dan I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani. (2019). "Kajian Yuridis Pembatalan Perjanjian Pengikatan Akta Jual Beli Tanah Terkait Syarat Subjektif". *Jurnal Repertorium*. Vol. 8, No. 1.

Hamid, Rivaldy. (2014). "Tuntutan Ganti Rugi dalam Perbuatan Melawan Hukum Kepemilikan Hak Atas Tanah (Studi Di Desa Pilohayanga)". *Jurnal Amandemen*. Vol. 1, No. 3.

Kuniawati, Ni Made. 2020. "Akibat Hukum Penerbitan Sertifikat Hak Milik Melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang Mengandung Cacat Yuridis". Jurnal Analogi Hukum. Vol. 2, No. 6.

Putra, I Gusti Agung Ketut Bagus Wira Adi. (2020). "Keabsahan Jual Beli Tanah Hak Milik yang Dilakukan dengan Surat Kuasa Mutlak". *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH).* Vol. 6, No. 1.

Qomariyanti Yulia. (2014). “Kekuatan Pembuktian Sertifikat Hak Atas Tanah sebagai Alat Bukti dalam Perkara Perdata”. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*. Vol. 21, No. 3.

Suyuthi Wildan. (2018). “Asas Ne Bis In Idem dalam Gugatan Perbuatan Melawan Hukum”. *Jurnal Yudisial*. Vol. 11, No. 1.

Tjukup, I Ketut, dkk. 2020. “Akibat Hukum Perbuatan Melawan Hukum dalam Perjanjian Jual Beli Tanah”. *Jurnal Preferensi Hukum*. Vol. 1, No. 2.

Wisnawa, I Gede Pasek Eka dan I Nengah Suharta. (2020). Kedudukan Badan Pertanahan Nasional sebagai Turut Tergugat dalam Sengketa Kepemilikan Hak Atas Tanah”. Jurnal Kertha Semaya. Vol. 8, No. 6.

D. Putusan Pengadilan dan Yurisprudensi

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 329 K/Sip/1957 tanggal 24 September 1958.

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 126 K/Sip/1976 tanggal 4 November 1976.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3604 K/Pdt/1985.

Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 214/Pdt.G/2021/PN.Smn.

Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 293/Pdt.G/2020/PN.Smn.

E. Sumber Lain

Harsono, Boedi. (1997). “Perkembangan Hukum Tanah Adat Melalui Yurisprudensi”. Makalah/Ceramah disampaikan dalam Simposium Undang-Undang Pokok Agraria dan Kedudukan Tanah-Tanah Adat Dewasa ini. Banjarmasin, 7 Oktober.

Kronologi Kejadian yang dibuat oleh Sriyono. Pelemsari. 17 Oktober 2023.

Surat Pernyataan yang dibuat oleh Sri Sunarti. Jakarta, 3 Desember 2020.